Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

Salam Redaksi

Ada banyak cara untuk menunjukkan simpati atau sebaliknya kepada publik atau lebih khusus lagi bagi konstituennya. Para petinggi DPR yang sebelumnya dianggap tak peka dan tak peduli dengan suara dan penderitaan rakyat karena hendak membangun gedung DPR baru yang lebih megah (padahal yang lama pun masih layak dioperasionalkan), mencoba untuk menarik kembali simpati rakyat dengan menggulirkan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan DPR. Pembentukan Pansus ini lebih banyak di latar belakangi oleh penyelesaian dan persidangan Kasus Gayus Tambunan yang ternyata menjalar ke mana-mana hingga menjadi komoditas politik karena ada indikasi keterlibatan orang politik dalam mark-up pajak, meski hal ini kemudian dibantah oleh yang bersangkutan.

Sayang seribu sayang, pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR ini tak berjalan mulus. Partai pengusung (Golkar, PDI-P, PKS, Hanura dan Gerindra) akhirnya harus mengakui keunggulan partai yang menolak pembentukan Pansus (Demokrat, PAN, PPP, PKB). Voting ini juga diwarnai dengan pembelotan anggota partai yang menolak, yaitu Lily Wahid dan Effendy Choirie. Alih-alih mendapatkan simpati rakyat karena pembentukan Pansus, akhirnya malah kandas. Bagi PKB, proses ini pun menyisakan masalah dengan adanya suara yang tak separtai dalam partai itu sendiri. Itulah kejamnya voting.

Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut adalah bahwa upaya menarik simpati rakyat atau mengembalikan kepercayaan rakyat pada lembaga negara seperti DPR, tak perlu membuat sesuatu yang bersifat "mercusuar" namun akhirnya tak berwujud. Masyarakat membutuhkan sentuhan langsung dan kepedulian sebagai wujud dari kepekaan anggota DPR pada konstituennya, bukan pada langkah yang nampaknya "besar" dari segi komoditas politik, akan tetapi lemah dalam hal pengabdiannya kepada rakyat. Nampaknya ungkapan bahwa vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) sudah tak bermakna lagi, atau malah Tuhan sendiri sudah dikibuli.

Tak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya DPR sendiri bukanlah tempat yang bersih. Bukan hanya Gayus Tambunan yang telah mencemari institusinya sendiri dengan melakukan penyalah-gunaan wewenang, banyak pula anggota DPR yang melakukan hal serupa. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun membenarkan hasil survei Cluster For Security and Justice yang menyatakan 78 persen kalangan menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga terkorup. Kalau sudah begini, apakah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi bisa membentuk semacam Pansus untuk menyelesaikan persoalan korupsi di tubuh DPR. Nampaknya ini perlu menjadi renungan apabila lembaga penegak hukum termasuk KPK sudah tak mampu lagi menangani korupsi di negeri yang penuh warna ini.

Purwokerto, Februari 2011

Ketua Penyunting

Agus Raharjo